

PERSIAPAN MENGHADAPI TANTANGAN ABAD 21 SEDINI MUNGKIN MELALUI PAUD YANG BERKUALITAS

Oleh: Ditha Cahya Kristiena
Peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK)

Usia dini adalah masa emas bagi perkembangan otak anak yang waktunya sangat kritis, yaitu sejak lahir sampai dengan kurang lebih usia 6 tahun. Pada masa ini, seluruh aspek perkembangan anak yaitu fisik (motorik kasar dan halus), kognitif, emosi, sosial, bahasa, konsep diri, etika dasar, dan moral terus tumbuh dan berkembang dengan pesat. Untuk mempersiapkan anak menghadapi berbagai kesempatan dan tantangan Abad 21, orang dewasa bertanggung jawab untuk menciptakan pengalaman belajar yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dukungan orang dewasa bukan hanya ditujukan pada peningkatan kemampuan membaca, berhitung, sains, dan ilmu sosial, tetapi juga bagaimana menyiapkan keterampilan Abad 21, yakni kemampuan bernalar, berpikir kritis dalam menganalisis masalah, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, literasi teknologi, dan keterampilan sosio-emosional yang diperlukan sebagai dasar menumbuhkan karakter positif. Keterampilan-keterampilan tersebut perlu dibangun dan dikembangkan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ditujukan secara eksplisit oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 1, butir 14 sebagai "suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut". Dalam melakukan upaya pembinaan tersebut, dibutuhkan sejumlah intervensi kebijakan PAUD. Intervensi ini diusulkan berdasarkan pengamatan PSPK terhadap kebijakan dan implementasinya.

SINKRONISASI KEBIJAKAN

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 137 tahun 2014, PAUD diharapkan dapat membantu anak supaya pertumbuhan dan perkembangannya matang serta memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Pertumbuhan anak menyangkut pertambahan berat dan tinggi anak, sedangkan perkembangan anak ditujukan pada integrasi dari aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional, serta seni.

Permendikbud No. 137 tahun 2014 ini mengatur standar nasional PAUD yang merupakan kriteria pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh Indonesia, bertujuan untuk menjamin pendidikan berkualitas dan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan

dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Dalam SNP PAUD, standar yang menjadi acuan pengembangan adalah STPPA (Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak). Begitu pula dengan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyiapkan Kurikulum 2013 PAUD yang tertuang dalam Permendikbud No. 146 tahun 2014, yang juga mengacu pada STPPA.

Tabel 1 Perbandingan Permendikbud No. 146 dan 137 tahun 2014

Permendikbud No. 146 tahun 2014	Permendikbud No. 137 tahun 2014
<p>Dalam Lampiran I, pencapaian perkembangan anak diturunkan dari Kompetensi Dasar (yang merupakan turunan dari Kompetensi Inti):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Dasar Sikap Spiritual 2. Kompetensi Dasar Sikap Sosial 3. Kompetensi Dasar Pengetahuan 4. Kompetensi Dasar Keterampilan 	<p>Dalam Lampiran I, pencapaian perkembangan anak diturunkan dari 6 Lingkup Perkembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Agama dan Moral 2. Fisik-Motorik 3. Kognitif 4. Bahasa 5. Sosio-emosional 6. Seni

* Di akhir layanan anak diharapkan dapat mencapai 4 Kompetensi Inti, namun tidak ada matriks hubungan antara 6 Lingkup Perkembangan dengan Kompetensi Dasar.

INTEGRASI CATATAN TUMBUH KEMBANG ANAK USIA DINI

Sejumlah studi menunjukkan bahwa perkembangan anak usia dini merupakan tahap perkembangan yang paling signifikan dalam masa hidup manusia. Sebagai contoh, kemampuan kognitif yang paling meningkat tajam pada anak usia dini dan melambat saat remaja¹. Atau studi tentang perkembangan kepribadian awal ada di masa anak usia dini, studi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara anak usia dini dengan pengasuh sangat penting untuk pencapaian perkembangan ini. Hal ini karena periode usia dini memiliki peluang besar sekaligus kerentanan untuk kesehatan psikososial, tergantung pada kualitas dan kestabilan dari kualitas ini².

Pendidikan anak usia dini yang berkualitas memiliki efek jangka panjang yang berkelanjutan pada pengembangan sumber daya manusia, kohesi sosial, dan keberhasilan ekonomi³. Maka penting bagi Indonesia untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sesuai dengan tuntutan perkembangan anak dan siap memasuki bangku sekolah.

Indonesia saat ini sudah memiliki standar terkait pencapaian perkembangan yang tertuang dalam standar nasional pendidikan anak usia dini, yakni STPPA. STPPA adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak dalam rentang waktu

¹Luna, Garver, Urban, Lazar, & Sweeney, 2004; Segalowitz & Davies, 2004; Waber, et al. (2007)

²Thompson (1998)

³Heckman, James. (2013)

usia dini (usia lahir sampai dengan 6-7 tahun), yang menjadi acuan pengembangan kurikulum PAUD, yang ditujukan pada integrasi dari perkembangan nilai, moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional. Pencatatan pertumbuhan sebenarnya sudah difasilitasi.

Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini dapat membantu Indonesia mengetahui apakah anak-anak kita sudah mencapai tahapan perkembangan tertentu atau belum. Saat ini, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) baru memuat data-data input yang mendasar seperti angka partisipasi, jumlah guru, tingkat pendidikan guru, atau data mengenai infrastruktur, belum memuat data yang menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan anak, atau luaran dari program PAUD. Dengan tidak adanya data pencapaian tersebut, bagaimana tingkat keberhasilan dan ketercapaian tumbuh kembang anak di usia persiapan masuk sekolah dapat diketahui? Instrumen ini bisa menjadi umpan balik untuk pemerintah dalam menyiapkan program PAUD berkualitas yang berkelanjutan.

Selain disain instrumen, yang juga harus menjadi perhatian adalah sosialisasi dan pelatihan penggunaan serta fungsi instrumen. Jika fungsi instrumen dan tujuan asesmen tidak utuh sampai kepada orang tua (termasuk juga guru), ini akan memunculkan dampak high stakes dan seolah menjadi tuntutan orang tua bahwa anak wajib mencapai target, misalnya perlu mencapai skor tertentu berdasarkan instrumen.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, keberadaan instrumen dapat menjadi acuan preventif dan berpotensi meningkatkan partisipasi orang tua. Orang tua perlu tahu dan diberi tahu apa yang harus dilakukannya jika anak mereka mengalami keterlambatan baik dalam pertumbuhan maupun perkembangan. Alur penanganan dan koordinasinya pun harus jelas kemana rujukannya. Alur rujukan ini sangat perlu melibatkan lembaga atau dinas terkait di daerah, sehingga deteksi dini keterlambatan bisa lebih optimal.

Sebagai tambahan, salah satu alternatif instrumen yang bisa menjadi rujukan Indonesia dan telah digunakan di beberapa negara di dunia⁴ adalah MODEL (*Measure of Development and Early Learning*). MODEL merupakan instrumen turunan dari instrumen MELQO (*Measuring Early Learning Quality and Outcomes*) yang digunakan untuk mengukur kualitas, perkembangan dan pembelajaran anak di PAUD serta lingkungan PAUD itu sendiri. MODEL merupakan instrumen khusus agar pemangku kebijakan bisa memahami dengan lebih baik bagaimana status perkembangan anak yang mengukur enam domain, literasi, numerasi, perkembangan sosio-emosional, executive function, perkembangan fisik, dan informasi kontekstual. Instrumen ini tidak bertujuan high-stakes karena hasilnya digunakan untuk merumuskan cara terbaik untuk perkembangan dan pembelajaran anak usia dini, bukan sebagai syarat apakah anak bisa masuk sekolah atau tidak, misalnya yang dilakukan Mongolia dan Madagaskar. Di Indonesia sendiri, instrumen ini digunakan oleh UNICEF di beberapa daerah intervensinya⁵.

⁴Dikembangkan oleh UNESCO, UNICEF, Center for Universal Education at the Brookings Institution dan World Bank

⁵Dikembangkan oleh ACER



KEMAMPUAN GURU PAUD UNTUK MENGHADAPI ABAD 21

Untuk menyiapkan anak usia dini agar memiliki keterampilan abad 21, diperlukan faktor kunci yaitu guru atau pendidik yang mampu memfasilitasi dan menumbuhkan kemampuan-kemampuan abad 21 tersebut. Berdasarkan data Publikasi Statistik PAUD tahun 2016-2017 dari Kemdikbud, masih ada 47,7 % guru PAUD yang belum memiliki kualifikasi akademik sarjana, bahkan 5,9 % merupakan lulusan SMP. Namun demikian, studi menunjukkan bahwa di sebagian wilayah Indonesia, terdapat guru PAUD yang memiliki kualitas pengajaran yang baik, berdedikasi untuk siswanya, walaupun mereka tidak yang memiliki gelar akademik sesuai yang distandarkan⁶. Temuan seperti ini membangun perdebatan bahwa perlu diperhatikan bukanlah gelar akademik semata, tapi seberapa terlatih guru PAUD yang kita miliki sehingga mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan. Salah satu elemen kualitas pendidikan anak usia dini adalah pembelajaran yang dikembangkan, diimplementasikan, dan disupervisi oleh guru dan tenaga pengajar yang terlatih dalam hal bagaimana mengenali, membangun empati, menciptakan keterlibatan, memantau perkembangan, dan menciptakan pengembangan berkelanjutan dengan anak⁷.

Kualitas guru memang tergolong kompleks, level pendidikan sendiri mungkin tidak cukup secara konsisten memprediksi kualitas⁸. Sistem pengembangan profesional guru yang komprehensif untuk guru pre-service dan in-service dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan untuk guru dalam memberikan sebuah pengalaman mendidik anak usia dini yang berkualitas

yang dapat berdampak positif terhadap perkembangan anak .

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru PAUD di level pusat ditangani oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dan penyelenggaraan PAUD-nya sendiri di bawah Dirjen PAUD & Dikmas yang sama-sama masih di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) serta di bawah Kementerian Agama (Kemenag) untuk PAUD berjenis RA (Raudhatul Athfal) dan BA (Bustanul Anfal). Maka, perlu ada koordinasi yang baik antara Dirjen PAUD & Dikmas yang mengurus PAUD dengan Dirjen GTK yang memastikan kualitas guru PAUD atau dirjen yang ada di bawah Kemenag. Sementara, pendidikan guru pre-service berada di bawah kementerian yang berbeda, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti)¹⁰. Dengan adanya perbedaan lembaga ini, pengelolaan kualitas guru membutuhkan koordinasi lintas bagian dan lintas kementerian yang lebih jelas, termasuk kesesuaian apa yang dipelajari calon guru dengan ekspektasi pembelajaran di PAUD, sampai pada distribusi lulusan.

Sementara untuk program dalam jabatan (in-service) sendiri, pemerintah pusat melalui Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) telah memberikan Pendidikan Kilat (Diklat) Berjenjang, mulai dari tingkat dasar, lanjut, hingga mahir, untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas guru. Sampai tahun 2015, sudah ada 125.902 guru yang telah mengikuti Diklat Berjenjang mulai dari dasar hingga lanjut dengan 7.461 orang mengikuti Pelatihan Calon Pelatih (PCP) di seluruh Indonesia ¹¹.

⁶ ACDP (2014)

⁷ Heckman (2012)

⁸ Early dkk. (2007)

⁹ Schilder, D. (2016)

¹⁰ Permendikbud No. 11 (2015)

¹¹ Dirjen GTK dalam Kompas Media

ANGGARAN PAUD MENINGKAT, SUDAH CUKUPKAH?

Sementara itu, total guru PAUD di Indonesia tahun 2016/2017 ada sekitar 628.297 guru (tanpa guru RA/ BA)¹², jadi masih banyak sekali guru yang belum mendapatkan peningkatan kapasitas melalui Diklat Berjenjang ini. Kemudian pelatihan yang dilakukan beberapa jam atau hari saja mungkin belum tentu mengubah cara guru belajar, walaupun dalam diklat berjenjang saat ini, selain pelatihan, terdapat kunjungan belajar lokal dan mengikuti kegiatan gugus, perlu juga pendampingan intensif pasca pelatihan. Salah satu praktik baik yang dilakukan oleh UNICEF di Kupang dan Bogor sangat memungkinkan diduplikasi di berbagai daerah¹³. Pengembangan kapasitas yang disertai dengan pendampingan akan lebih berdampak dibandingkan hanya pelatihan saja.

Peningkatan kualifikasi melalui pelatihan dan pendidikan guru PAUD ini sangat perlu mendapat perhatian khusus, setidaknya untuk pendidikan anak usia dini minimal satu tahun yang sedang dunia dan pemerintah gencar promosikan. Akan tetapi, hal ini bukan berarti mengesampingkan level pendidikan akademik, karena guru yang memiliki kualifikasi akademik tinggi dan pernah mengikuti pelatihan khusus lebih memiliki interaksi yang lebih positif dengan murid, termasuk dalam mengapresiasi, menghibur, mengembangkan anak dengan bertanya, dan bagaimana responsif terhadap kebutuhan anak, terlebih untuk kondisi Indonesia yang pendidik PAUD-nya masih banyak yang memiliki kualifikasi di bawah standar¹⁴.

Tidak bisa dipungkiri, salah satu pendorong keberhasilan komitmen Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals - SDGs*) dalam memastikan semua anak memperoleh akses terhadap perkembangan, perawatan, dan pendidikan anak usia dini berkualitas di tahun 2030 memerlukan sokongan pendanaan. Anggaran yang dialokasikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap tahunnya memang meningkat. Misalnya, untuk tahun 2018¹⁵ dari total anggaran belanja negara senilai Rp 2.220,7 triliun, Rp 4,1 triliun ditransfer ke daerah sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Rp 1,805 miliar masuk melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan Dikmas)¹⁶. Angka tersebut (anggaran BOP PAUD dan Dirjen PAUD dan Dikmas), jika dihitung persentase kasarnya¹⁷ hanya sekitar 0,18 % dari total anggaran belanja negara atau 0,92 % dari total anggaran fungsi pendidikan (Rp 444,1 triliun). Meskipun cukup kecil, angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2017 misalnya, hanya 0,17 % dari anggaran belanja negara dan 0,87 % dari anggaran fungsi pendidikan.

¹² Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud, 2017)

¹³ Wawancara kepada Nugroho Indera Warman, Education Specialist UNICEF

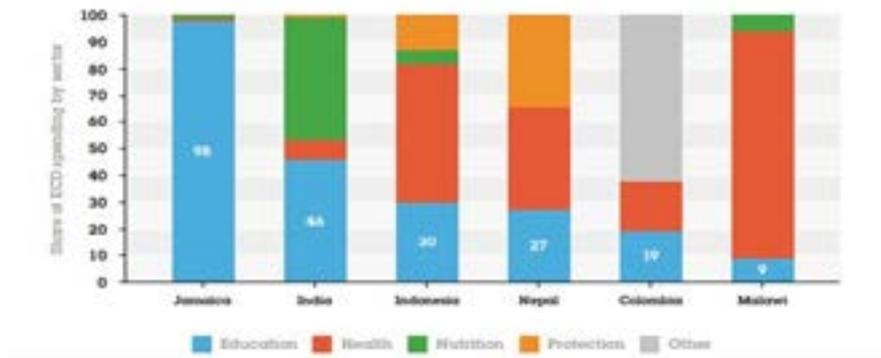
¹⁴ Howes dkk. (2003)

¹⁵ APBN (2018)

¹⁶ Kemdikbud.go.id

¹⁷ Masih termasuk dengan anggaran pendidikan masyarakat dan tanpa dana yang dialokasikan untuk pengembangan guru PAUD yang masuk ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan/ GTK

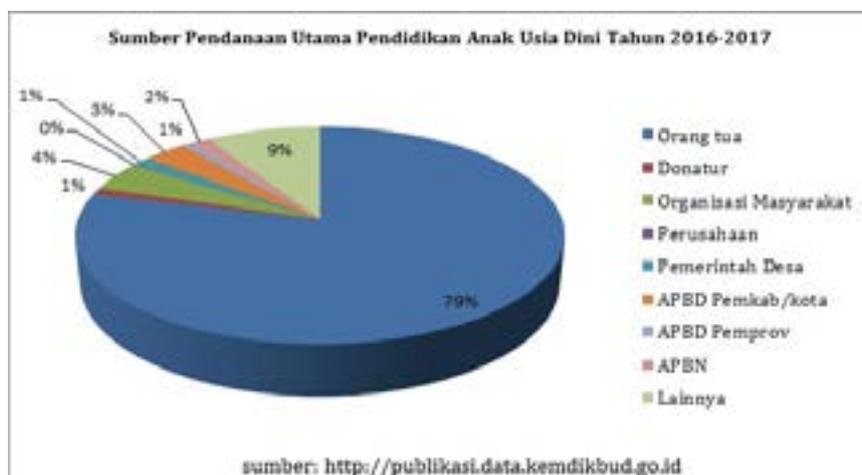
Grafik 1 Perbandingan Proporsi Alokasi Dana yang Dikeluarkan Pemerintah untuk Anak Usia Dini



Hasil studi yang dilakukan Heckman (2012) menunjukkan bahwa investasi program pendidikan anak usia dini bisa mengembalikan nilai investasi dengan keuntungan 7-10 % tiap tahunnya¹⁸. Hasil studi ini pun didukung oleh pendapat Baron (2012), bahwa berinvestasi dalam pendidikan anak usia dini memberikan pengembalian investasi terbaik untuk masyarakat karena dapat mengurangi pengulangan kelas dan putus sekolah, kesehatan yang lebih baik dan lain-lain¹⁹. Maka, jika negara mau berinvestasi dalam bidang ekonomi dan kehidupan bangsa ke depan, investasi dalam pendidikan anak usia dini perlu dilakukan secara serius. Yakni dengan mengembangkan pelayanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas.

Sebagai gambaran, rata-rata negara partisipan OECD menginvestasikan anggaran untuk pendidikan anak usia dini sekitar 0,7 % dari Produk Domestik Bruto (PDB)²⁰ dan tahun 2017 presentase anggaran PAUD kita hanyalah 0,00 4%. Butuh dinaikan 175 kali lipat untuk sama dengan rata-rata negara OECD. Tentunya ini akan berat dan sulit sekali dilakukan. Namun, yang masih memungkinkan dilakukan adalah menaikkan porsi anggaran PAUD dari total anggaran pendidikan. Misalnya menaikkan menjadi jumlah yang sama dengan rata-rata negara OECD, 0,7 % dari anggaran belanja negara atau setara dengan 3,6 % dari fungsi pendidikan. Itu pun sebenarnya dibandingkan dengan anggaran Vietnam pada tahun 2011 yang sudah mengalokasikan 8,22 % dari anggaran pendidikan untuk pendidikan anak usia dini²¹, proporsinya masih berada di bawahnya.

Grafik 2 Sumber Pendanaan Utama PAUD di Indonesia



¹⁸ www.heckmanequation.org

¹⁹Unicef.org

²⁰www.oecd.org

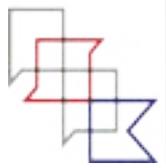
²¹Tan, Rayginne G.H. (2016)

ASPEK LAIN YANG PERLU DIKAJI

Terkait sarana prasarana juga mungkin perlu dikaji ulang mengenai Permendikbud No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Standar nasional PAUD sarana dan prasarana, mensyaratkan ukuran ruangan dan halaman minimal 300m² atau minimal 3m² per anak untuk PAUD nonformal, pengaturan ukuran ini dikhawatirkan mengarahkan masyarakat untuk fokus kepada urusan infrastruktur agar sesuai standar nasional dibanding kualitas atau proses pembelajaran melalui permainan itu sendiri. Belum lagi syarat yang mengharuskan adanya diferensiasi ruang, seperti ruang kepala sekolah, ruang guru, dan ruang UKS, karena yang terpenting dari sarana PAUD adalah tempat yang memberikan kebebasan anak bergerak dan menjadi tempat anak-anak mengekspresikan diri, seperti dinding yang digunakan untuk anak memperlihatkan karyanya.

Kunci dari keberhasilan menyiapkan anak usia dini agar memiliki keterampilan abad 21 adalah pengembangan kapasitas guru PAUD yang perlu dilakukan secara berkelanjutan baik dalam masa *pre-service* maupun *in-service*. Maka, pemerintah pusat perlu mendorong peran pemerintah daerah untuk melakukan advokasi berupa memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya layanan PAUD berkualitas, yang bukan berfokus fasilitas fisik semata, tapi juga mendorong masyarakat yang telah memberikan iuran untuk penyelenggaraan PAUD untuk meletakkan fokus pada mutu pengembangan kapasitas guru PAUD. Misalnya, kebijakan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD bisa dialokasikan secara spesifik untuk digunakan dalam mengembangkan kapasitas mutu guru PAUD yang sebaiknya tidak digabung dengan kegiatan lain.

Menyiapkan generasi yang mampu bersaing di masa depan, banyak pekerjaan rumah yang perlu disiapkan Indonesia. Kebijakan yang sinkron, memastikan anak yang tumbuh dan kembangnya optimal, pelibatan orangtua yang kuat, pendidik yang berfokus pada bagaimana menstimulasi tumbuh kembang anak, anggaran yang optimal, serta tentunya koordinasi berbagai pihak untuk memberikan pendidikan yang holistik dan integratif.



PUSAT STUDI
PENDIDIKAN DAN KEBIJAKAN

Pemimpin Redaksi: Ifa H. Misbach
Redaktur: 1. Henny Supolo 2. Najelaa Shihab
Editor: Nisa Felicia & Chandra C. A. Putri

Didukung oleh:

INDIKA FOUNDATION **Wardāh**



PSPK_Indonesia



pspk_id



pspk_id